

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERTANIAN KAB. PESISIR SELATAN TAHUN 2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, yang menjadi bagian akhir dari perjalanan panjang RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005-2025, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan harus mampu menjawab target yang telah ditetapkan serta menjawab berbagai dinamika yang terjadi. Dalam rangka merespon tantangan dan dinamika global seperti tantangan klasik sektor pertanian, dampak perubahan iklim, tekanan geopolitik dunia, pembatasan distribusi dan tantangan perdagangan dunia, maka Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan harus cepat dan tanggap menyusun strategi untuk mengamankan pangan nasional dan pertumbuhan perekonomian khususnya sektor pertanian.

LKj tidak hanya menjelaskan keberhasilan pembangunan pertanian, namun juga memberikan penjelasan terkait tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya perbaikan dan perhatian serius untuk pencapaian target pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap, kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang akan datang dapat lebih baik dan ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang optimal, serta mengatasi permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2025 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan serta dukungan pemangku kepentingan



mulai dari tingkat Pusat dan Daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, Akademisi dan tidak lupa yang terpenting peran Petani. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Besar harapan kami, Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dan dapat memberikan manfaat serta menjadi umpan balik (feedback) bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Demikian LKj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, terima kasih.

Painan, 19 Februari 2026
Pih. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan,



HENDRO KURNIAWAN, S.T.
NIP. 19760518 201101 1 002

IKHTISAR EXECUTIVE

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi dan APBN) tahun anggaran 2025 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya Kepemerintahan yang baik (*good governace*).

Penyusunan LKj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama dan misi ketiga. Misi pertama yaitu **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan** dan misi ketiga yaitu **“Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah”**.

Seiring dengan harapan tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 27). Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Pertanian Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

- VISI** : **Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional**
- MISI 1** : **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**
- TUJUAN 1.1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
- SASARAN 1.1.1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
- MISI 3** : **Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah**
- TUJUAN 3.1 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan
- SASARAN 3.1.2 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
- SASARAN 3.1.4 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, maka untuk mewujudkan itu semua ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkap pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Misi	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2025			
					Target		Realisasi	%
					Awal	Revisi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	A (89,98)	A (89,98)	A (89,50)*	99,47
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	100	91	92	101,10
2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliyun	3,16	3,16	3,09*	97,78
Rata-rata capaian (%)								99,45

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari tabel 1 diatas dapat dijelaskan, bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 melakukan revisi target pada indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian dari 100 menjadi 91, ini merupakan tindaklanjut atas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2024 yang mana nilai capaiannya hanya mencapai 90% (dari target 100,



tercapai 90) sehingga untuk target tahun 2025 ditetapkan sebesar 91 (diatas capaian tahun 2024). Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar 99,45% dengan kategori "sangat baik", dengan persentase capaian tertinggi pada indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian sebesar 101,10%.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi serta mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan dimasa yang akan datang semua capaian sasaran strategis dapat lebih maksimal.

Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun sehingga dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien pada tahun berikutnya serta sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 19 Februari 2026
Plh. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan,



HENDRO KURNIAWAN, S.T.
NIP. 19760518 201101 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.2.1 Maksud Penyusunan LKj.....	2
1.2.2 Tujuan Penyusunan LKj.....	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA.....	3
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA.....	8
1.5 LANDASAN HUKUM.....	19
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	25
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016- 2021..	25
2.1.1 Visi.....	25
2.1.2 Misi.....	26
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	27
2.2 RENCANA KINERJA.....	29
2.3 PERJANJIAN KINERJA.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA.....	34
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	35
3.3 CAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	37
3.4 REALISASI ANGGARAN.....	78
BAB IV PENUTUP	83



4.1	KESIMPULAN.....	83
4.2	SARAN.....	83
	DAFTAR LAMPIRAN.....	85
	PENGHARGAAN YANG DITERIMA.....	86

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025..... v
Tabel 1.1	Komposisi Aparatur pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin..... 5
Tabel 1.2	Komposisi Jumlah Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan. 6
Tabel 2.1	Rasionalisasi Target Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026..... 28
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026..... 28
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025..... 30
Tabel 2.4	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan..... 31
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025..... 33
Tabel 2.6	Program dan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025..... 32
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025..... 35
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025..... 35
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2025..... 38
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir..... 39
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi..... 40
Tabel 3.6	Perbandingan Nilai Sakip Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025... 40
Tabel 3.7	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 47
Tabel 3.8	Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025..... 53



Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	55
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	56
Tabel 3.11	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	57
Tabel 3.12	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	57
Tabel 3.13	Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Tahun 2025.....	59
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	60
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	62
Tabel 3.16	Perbandingan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025.....	62
Tabel 3.17	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	63
Tabel 3.18	Capaian Produksi Pertanian Tahun 2023 s.d Tahun 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan.....	64
Tabel 3.19	Luas Lahan Sawah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025....	65
Tabel 3.20	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	76
Tabel 3.21	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 yang Menunjang Sasaran Strategis.....	79

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1.1	Komposisi Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin..... 5
Grafik 1.2	Komposisi Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... 6
Grafik 3.1	Capaian Kinerja Per Indikator Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025..... 37
Grafik 3.2	Tren Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2023-2025..... 39
Grafik 3.3	Tren Capaian Kinerja Pada Indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian Tahun 2023 s.d 2025..... 55
Grafik 3.4	Tren Capaian Kinerja Pada Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2023 s.d 2025..... 60
Grafik 3.5	Perbandingan Capaian PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dengan PDRB Sektor Pertanian Tahun 2023 s.d Tahun 2025..... 61
Grafik 3.6	Kontribusi Komoditi Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 s.d Tahun 2025..... 61
Grafik 3.7	Realisasi Anggaran Per Program Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025..... 81

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	7
Gambar 3.1 Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.....	41
Gambar 3.2 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	42
Gambar 3.3 Sertifikat Penghargaan ASN yang Berprestasi Tahun 2025.	43
Gambar 3.4 Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi	43
Gambar 3.5 Sertifikat Terbaik I RKPD Tahun 2024 (gambar kanan) dan Sertifikat Terbaik I Nilai AKIP Tahun 2024 (gambar kiri).....	44
Gambar 3.6 Penyerahan Sertifikat Penghargaan Atas Pencapaian Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2024 oleh Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan	44
Gambar 3.7 Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala (Triwulan I s.d Triwulan IV) Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Tingkat Dinas	45
Gambar 3.8 Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Tingkat Bidang	45
Gambar 3.9 Youtube Dinas Pertanian.....	45
Gambar 3.10 Facebook Dinas Pertanian.....	46
Gambar 3.11 Instagram Dinas Pertanian.....	46
Gambar 3.12 Tiktok Dinas Pertanian.....	46
Gambar 3.13 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023.....	48
Gambar 3.14 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	48
Gambar 3.15 Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pertanian Tahun 2024.....	49
Gambar 3.16 Sertikat Penghargaan Inovasi Tahun 2025.....	53
Gambar 3.17 Surat Pengumuman Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Entri Data Penilaian Indeks Inovasi Daerah 2025.....	54
Gambar 3.18 Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).....	66
Gambar 3.19 Penyaluran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	69

Gambar 3.20	Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian ke Kelompok Tani.....	70
Gambar 3.21	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Tahun 2025.....	71
Gambar 3.22	Penanaman sistem Jajar Legowo 2:1 (sebelah kiri) dan Jajar Legowo 3:1 (sebelah kanan).....	72
Gambar 3.23	Pemangkasan tanaman upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman.....	72
Gambar 3.24	Pemantauan luas tanam padi sawah menggunakan drone..	73
Gambar 3.25	Pendidikan dan pelatihan petugas dan kelompok tani Tahun 2025.....	74
Gambar 3.26	Aktivitas peningkatan populasi ternak unggul melalui Inseminasi Buatan (IB) oleh Inseminator Tahun 2025.....	75
Gambar 3.27	Penyaluran ternak ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	75

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LKj) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan LKj atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, hingga entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain

yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud Penyusunan LKj

Maksud disusunnya LKj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang pertanian yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2025.

1.2.2 Tujuan Penyusunan LKj

Adapun tujuan penyusunan LKj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja

Bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2025.

2. Aspek Manajemen Kinerja

Bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jalan Diponegoro Painan Kecamatan IV. Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Gedung perkantoran utama dengan kondisi yang baik dan fasilitas yang masih kurang lengkap, serta 7 (tujuh) gedung Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan banyak yang rusak ringan, sedang dan berat.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu pimpinan daerah mewujudkan visi dan misi daerah dengan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b) penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c) pengembangan prasarana pertanian;
- d) pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e) pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian;
- f) pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h) pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i) pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j) pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l) pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;

- m) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 27) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a) sekretariat;
- b) bidang tanaman pangan;
- c) bidang hortikultura;
- d) bidang perkebunan;
- e) bidang prasarana dan sarana pertanian;
- f) bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g) bidang penyuluhan pertanian; dan
- h) UPTD.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, dimana jumlah total ASN dan Non ASN per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang yang terdiri atas :

- a. PNS sebanyak 62 (enam puluh dua) orang yang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) orang laki-laki dan 33 (tiga puluh tiga) orang perempuan; dan
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 116 (seratus enam belas) orang yang terdiri atas 49 (empat puluh sembilan) orang laki-laki dan 67 (enam puluh tujuh) orang perempuan.

Secara terinci jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pertanian pada tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tergambar pada tabel 1.1 dan grafik 1.1 berikut:

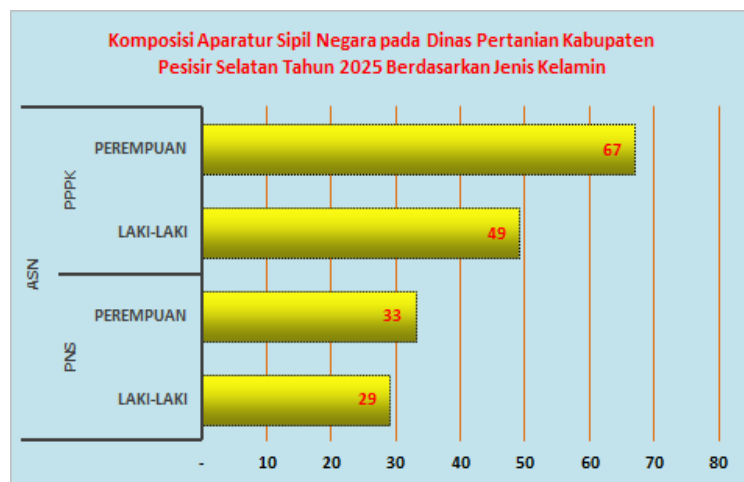
Tabel 1.1
Komposisi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	ASN						Total
	PNS			PPPK			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
2025	29	33	62	49	67	116	178
Jumlah	29	33	62	49	67	116	178

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2026

Dari tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan jenis kelamin komposisi aparatur sipil Negara pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh perempuan. Komposisi perempuan pada PNS sebesar 53,23% dan komposisi perempuan pada PPPK sebesar 57,76%, secara keseluruhan persentase komposisi perempuan mencapai 56,18% dan laki-laki sebesar 43,82%.

Grafik 1.1
Komposisi Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2026

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

- PNS dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 9 (sembilan) orang, jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang mendominasi jenjang pendidikan sumber daya manusia, pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 3 (tiga) orang, SMA sebanyak 7 (tujuh) orang; dan

- b. PPPK dengan jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang mendominasi jenjang pendidikan Sumber Daya Manusia, jenjang pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 3 (tiga) orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, SMP sebanyak 5 (lima) orang dan SD sebanyak 2 (dua) orang.

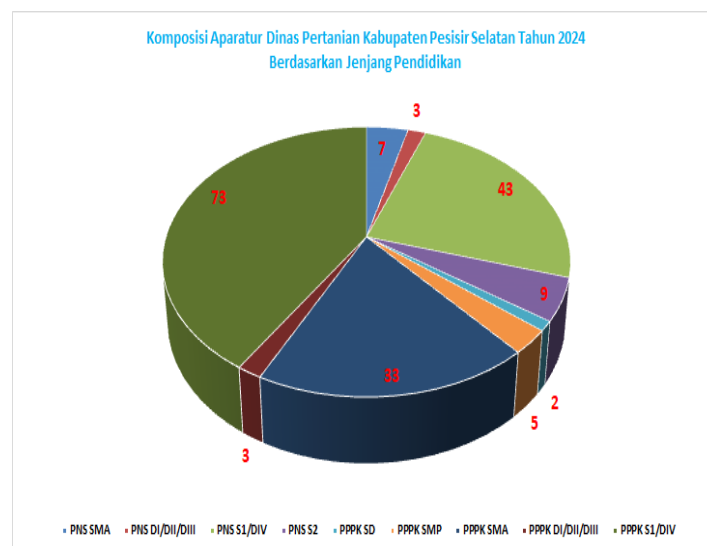
Dari data di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan sumber daya manusia Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2 dan grafik 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Jumlah Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tahun	ASN											Total
	PNS					PPPK						
	SMA	DI/ DII/ DIII	S1/ DIV	S2	Jumlah	SD	SMP	SMA	DI/ DII/ DIII	S1/ DIV	Jumlah	
2025	7	3	43	9	62	2	5	33	3	73	116	178
Jumlah	7	3	43	9	62	2	5	33	3	73	116	178

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2026

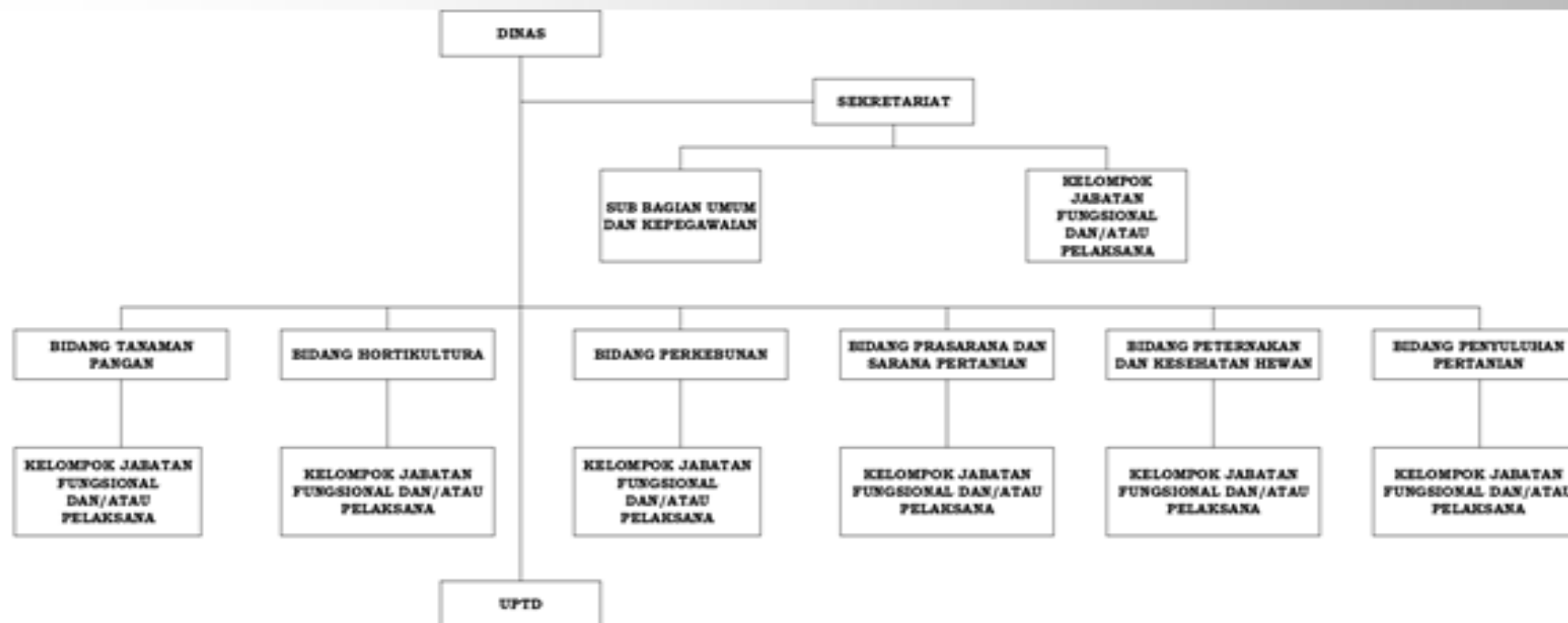
Grafik 1.2
Komposisi Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2026

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN (Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2025)



Gambar 1.1: Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Pembangunan pertanian secara umum memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi: peningkatan ketahanan pangan, produk domestik regional bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional. Permasalahan pembangunan pertanian merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan pertanian yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat ini. Dalam rangka melaksanakan kegiatan strategis/prioritas, maka perlu diperhatikan aspek-aspek strategis yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Merujuk pada identifikasi permasalahan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ada beberapa permasalahan dalam pembangunan sektor pertanian sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi. Dalam praktiknya, pengelolaan pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat harus duduk bersama untuk membicarakan berbagai permasalahan yang dihadapi bersama serta sekaligus merencanakan bersama pula mengenai sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa yang akan datang.

- 2) Masih rendahnya tingkat pendapatan petani/peternak.

Pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan di Pesisir Selatan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha guna meningkatkan daya saing serta meningkatkan pendapatan petani/peternak. Untuk itu, perlu adanya strategi dan kebijakan sebagai kerangka pembangunan Pertanian di Pesisir Selatan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan.

- 3) Belum Optimalnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman.
Pesisir Selatan memiliki sumber daya genetik berupa plasma nutfah Padi Sawah varietas Bawaan, Jengkol Bareh dan Lokan Pessel, Sapi Pesisir dan Itik Bayang. Namun belum diusahakan secara optimal karena Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman.
- 4) Masih Rendahnya Penggunaan Benih Bersertifikat untuk Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
Penggunaan benih bersertifikat dan penerapan teknologi sangat berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil tanaman. Pemakaian benih bersertifikat di Pesisir Selatan masih sangat rendah, untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil sebagaimana yang diharapkan. Perlu optimalisasi prasarana dan sarana, pengawasan, pengembangan kelembagaan, penataan alur distribusi dan sosialisasi penggunaan benih bersertifikat.
- 5) Belum terpenuhinya kebutuhan benih ternak unggul.
Sebagian besar benih ternak unggul berupa frozen semen untuk Inseminasi Buatan (IB) didatangkan dari luar daerah, yaitu di BIB Limbukan Tuah Sakato Payakumbuh, BIB Lembang Bandung, BIB Singo Sari Jawa Tengah. Jumlah aseptor IB 9.000 (sembilan ribu) ekor per tahun di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jumlah tersebut dibutuhkan 12.000 (dua belas ribu) dosis frozen semen. sedangkan rata-rata pengadaan frozen semen sumber dana APBD Kabupaten sebanyak 2.000 (dua ribu) dosis setiap tahun dan tidak ada lagi bantuan dari provinsi dan pusat, dengan demikian terdapat kekurangan frozen semen sekitar 10.000 (sepuluh ribu) dosis per tahun.
- 6) Terbatasnya Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian.
 - a) Prasarana.
Optimalisasi pengelolaan lahan pertanian dengan basis teknologi modern menjadi kunci sukses dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun berbagai permasalahan yang kerap

ditemui terkait lahan pertanian antara lain tingkat kesuburan lahan yang masih rendah di beberapa tempat, Masih adanya alih fungsi lahan pertanian produktif ke sektor lain seperti perumahan, pabrik, jalan, tempat wisata, dan fasilitas umum lainnya. Masih diperlukannya penambahan luas lahan sawah bagi usaha budidaya tanaman padi guna mendukung swasembada padi, Optimasi lahan – lahan terlantar sehingga lebih produktif bagi budidaya pertanian seperti optimasi lahan rawa dan lahan kering.

Air merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam budidaya pertanian. Tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal. Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada diluar sistem daerah irigasi dimana distribusi airnya belum dikelola secara teratur. Kondisi ini menyebabkan intensitas tanaman menjadi terbatas pada setiap tahunnya. Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dampaknya terhadap budidaya tanaman berjalan tidak optimal. Dilain pihak pertumbuhan penduduk semakin meningkat menuntut peningkatan ketersediaan bahan pangan.

Pembiayaan adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Namun demikian aksesibilitas petani/peternak terhadap pembiayaan merupakan masalah utama yang sering dikeluhkan oleh petani/peternak. Hal ini disebabkan oleh minimnya

informasi tentang berbagai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani/peternak. Di sisi lain lembaga pembiayaan masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang atraktif karena dianggap sangat berisiko (high risk), tergantung musim dan jaminan harga yang tidak pasti.

Meskipun skema pembiayaan usaha pertanian telah tersedia tetapi kondisi masyarakat petani/peternak masih dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani/peternak yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani/peternak untuk menambah permodalan melalui lembaga pembiayaan dan investasi. Pemerintah telah memberi berbagai fasilitas pembiayaan untuk memudahkan petani/peternak untuk mengakses permodalan untuk usaha taninya. Namun dalam implementasinya petani/peternak masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal sehingga hasilnya belum sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya realisasi penyaluran KUR untuk sektor pertanian.

b) Sarana.

Penggunaan alat mesin pertanian harus kita lakukan untuk mempercepat pengolahan tanah dan panen sehingga berdampak terhadap peningkatan indeks pertanaman dan produksi. Optimalisasi pemanfaatan alsintan juga dapat dilakukan melalui kegiatan Brigade Alsintan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disamping itu juga mengurangi biaya produksi, mengimbangi semakin berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian serta dapat meningkatkan mutu hasil pertanian.

Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi. Permasalahan yang selalu muncul adalah ketersediaan pupuk yang masih belum sesuai dengan kebutuhan petani, hal ini disebabkan alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam e-RDCK serta pupuk bersubsidi tidak tersedia saat dibutuhkan. Selain itu pemberian pupuk bersubsidi yang belum

menerapkan Prinsip 6 Tepat yaitu Tepat jenis, Tepat dosis/jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, Tepat tempat, dan Tepat mutu sehingga akan berdampak negatif pada kesuburan lahan, perkembangan organisme pengganggu tanaman yang pada akhirnya akan menurunkan produktifitas dan produksi hasil pertanian.

Untuk pemecahan masalah ini perlu dilakukan berbagai upaya antara lain penambahan alokasi pupuk bersubsidi, meningkatkan pendampingan kelompok tani oleh Penyuluh Pertanian dalam penyusunan e-RDCK, pengembangan dan pemakaian pupuk organik, meningkatkan koordinasi antara kabupaten/kota dengan produsen, distributor dan pengecer agar penyaluran pupuk bersubsidi tersedia saat dibutuhkan oleh petani, meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

7) Belum Optimalnya Peningkatan Produktivitas Pertanian.

Produktivitas adalah rasio antara input dan output dari suatu proses produksi dalam periode tertentu. Produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh input dan output dari pertanian. Input dari pertanian meliputi tenaga kerja, lahan pertanian, teknologi, dan modal, sedangkan output dari pertanian meliputi hasil pertanian yang dikelola. Selain itu produktivitas di bidang pertanian juga tidak lepas dari faktor-faktor sosial ekonomi yang ada disekitarnya.

Faktor ekonomi dalam hal ini meliputi pemanfaatan teknologi melalui penggunaan benih/bibit, penggunaan pupuk, penggunaan pakan, penggunaan pestisida serta peralatan pertanian yang digunakan. Pemanfaatan teknologi ini harus diseimbangkan dengan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia karena SDM merupakan komponen penting dalam peningkatan produksi.

Faktor sosial yang mempengaruhi produktivitas di bidang pertanian meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bertani. Rendahnya tingkat pendidikan disinyalir merupakan salah satu penyebab rendahnya

produktivitas petani/peternak. Selain itu pengalaman bertani akan membantu para petani/peternak mengambil keputusan dalam melakukan usaha tani. Semakin lama pengalaman bertani yang dimiliki oleh petani maka cenderung memiliki keterampilan tertinggi.

Perlu pengelolaan input dan output dari pertanian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian. Peningkatan produktivitas ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak dampak positif, baik kepada para petani/peternak untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/peternak maupun pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

8) Keterbatasan Ketersediaan Infrastruktur serta Sarana Prasarana Lahan dan Air.

Lahan dan air merupakan faktor produksi utama pertanian, keberadaan dan berfungsinya infrastruktur lahan dan air merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian khususnya padi, salah satu program yang harus dilaksanakan adalah rehabilitasi jaringan irigasi. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Pengelolaan irigasi harus memenuhi syarat kewenangan, diharapkan pada kesempatan ini seluruh stake holder terkait baik BWSS V, Provinsi dan Kecamatan dapat berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemecahan permasalahan terhadap kinerja sistem irigasi yang ada terutama pada kewenangan kabupaten kota yang merupakan daerah irigasi dengan jumlah dan luas yang paling besar sehingga kedepan masalah rehabilitasi jaringan irigasi tersebut dapat kita cari solusinya.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah embung, dam parit, jalan usahatani, jalan dan produksi. Tantangan yang harus dihadapi ke depan

adalah mengenai penyediaan semua prasarana yang dibutuhkan petani tersebut secara memadai untuk menekan biaya produksi yang tinggi akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian.

9) Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan.

Keberhasilan penyuluhan pertanian dalam penyampaian informasi teknologi kepada petani/peternak dan kelompok tani di lapangan selain SDM yang memadai juga dipengaruhi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan terutama yang berada di tingkat kecamatan. Secara umum saat ini kondisi sarana dan prasarana penunjang penyuluhan di Kabupaten Pesisir Selatan masih kurang.

10) Masih Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Petani, Peternak dan Petugas.

SDM pertanian merupakan pendukung utama dalam keberhasilan pembangunan pertanian itu sendiri sehingga langkah yang dilakukan adalah kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kemandirian petani/peternak dan kelompok tani dalam berusaha tani dan peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh/petugas.

Pendidikan dan usia petani/peternak menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani/peternak yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan petani ini berdampak terhadap keterbatasan dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan oleh petani. Dari sisi usia petani, petani berusia tua (lebih dari 55 tahun) jumlahnya semakin meningkat, sementara tenaga kerja usia muda semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian.

11) Terbatasnya jumlah Petugas dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tenaga Medik Veteriner sebanyak 9 (sembilan), secara teknis, kebutuhan tenaga medik veteriner untuk mengelola 7 (tujuh) unit

puskeswan, 2 (dua) unit perbibitan, 1 (satu) unit Pasar Ternak dan 1 (satu) unit Tempat Pemotongan Hewan dibutuhkan tenaga medis veteriner (Dokter hewan) sebanyak 14 orang.

- b) Tenaga Paramedik Veteriner/Inseminator sebanyak 14 (empat belas) orang, dengan luasnya wilayah jangkauan IB dan potensi akseptor sebanyak 26.000 (dua puluh enam ribu) ekor dibutuhkan Paramedik Veteriner/Inseminator sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang atau masih kurang 21 (dua puluh satu) orang.

12) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Kapasitas Kelembagaan Tani.

Salah satu strategi dalam menggerakkan petani/peternak dalam pembangunan pertanian adalah melalui pemberdayaan kelembagaan tani. Kelembagaan tani berperan sebagai jembatan antara petani dan pemerintah serta dapat menjadi wadah advokasi dan penyampaian aspirasi petani/peternak. Kelembagaan tani yang kuat dan mandiri dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani/peternak. Namun pada saat ini kelembagaan petani belum kuat dan mandiri, sehingga belum dapat berperan secara optimal sebagai mitra pemerintah dan penyalur aspirasi petani/peternak.

13) Berkurangnya Lahan Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan.

Keberlanjutan sektor pertanian dihadapkan pada ancaman penurunan luas lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian produktif ke non pertanian yang terjadi secara massif. Pembangunan sektor non pertanian serta kebutuhan masyarakat atas ruang dan pemukiman serta sarana prasarana lainnya menyebabkan terjadinya penyusutan lahan pertanian. Disisi lain upaya perlindungan lahan melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) belum efektif dalam pengendalian terhadap alih fungsi lahan.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor pertanian adalah konversi lahan yang tidak hanya menyebabkan produksi turun, tetapi juga

merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian.

- 14) Dampak Perubahan Iklim dan Serangan OPT serta serangan penyakit hewan Terhadap Peningkatan Produksi Pertanian.

Perubahan iklim global merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petani/peternak. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani/peternak dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani/peternak dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Sedangkan untuk kasus penyakit hewan yaitu perlu tersedianya vaksin

dan obat-obatan hewan sesuai kebutuhan serta pengetahuan masyarakat tentang higienis dan sanitasi kandang.

- 15) Rendahnya Akselerasi Pemanfaatan Inovasi Teknologi untuk Hilirisasi Pertanian.

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih lemah karena lambatnya diseminasi teknologi baru (invention) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (innovation) di tingkat petani/peternak. Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal. Sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, sistem penyampaian hasil teknologi dilakukan oleh penyuluh melalui proses aplikasi teknologi di area percontohan.

Pada era desentralisasi, kegiatan penyuluhan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan permasalahan pada sistem penyampaian teknologi menjadi lebih kompleks akibat kurangnya perhatian pemerintah daerah pada fungsi penyuluhan pertanian. Hubungan keterkaitan antara peneliti, penyuluh, dan petani/peternak dinilai masih lemah. Oleh karena itu perlu adanya penataan kembali fokus dan prioritas penelitian serta sistem diseminasi yang mampu menjawab permasalahan petani disertai dengan revitalisasi penyuluhan pertanian, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi petani.

- 16) Masih Tingginya Tingkat Kehilangan Hasil Dalam Proses Produksi, Panen dan Pasca Panen.

Upaya peningkatan produktivitas tidak akan berhasil jika tidak diiringi dengan upaya penekanan kehilangan hasil. Dalam proses produksi, panen dan pasca panen serta pengolahan hasil terjadi kehilangan hasil yang cukup tinggi (10,09%). Kehilangan hasil ini mulai dari penurunan kualitas sampai komoditas tersebut tidak layak pasar (not marketable) atau tidak layak dikonsumsi. Penanganan pasca panen yang baik akan menekan kehilangan (losses), baik dalam kualitas maupun kuantitas.

- 17) Belum optimalnya nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian.

Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan petani/peternak adalah melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian. Namun pada saat ini peningkatan nilai tambah produk pertanian masih rendah. Rendahnya peningkatan nilai tambah produk pertanian disebabkan oleh belum tersedianya peralatan yang memadai dan penguasaan teknologi oleh petani.

- 18) Belum optimalnya penggunaan Teknologi Pakan Alternatif untuk Pakan unggas dan pakan hijauan.

Peternak bisa menggunakan pakan unggas dari sumber daya alam dan limbah pertanian untuk memenuhi kadar nutrisi sebagaimana standar pakan unggas dengan formulasi ransum yang tepat, namun penerapan ini belum optimal.

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Peningkatan pendapatan petani/peternak;
- 3) Optimalisasi pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman;
- 4) Produksi benih padi sawah bersertifikat;
- 5) Peningkatan penggunaan benih bersertifikat;
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian;
- 7) Penerapan Sekolah Lapang GAP (Good Agriculture Practice), Sekolah Lapang PHT (Pengendalian Hama Terpadu), Sekolah Lapang Iklim (SLI), Sekolah Lapang GHP (Good Handling Practice), Sekolah Lapang GBP (Good Breeding Practice);
- 8) Optimalisasi peningkatan produktivitas pertanian;
- 9) Peningkatan ketersediaan air irigasi;
- 10) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan;
- 11) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM petugas dan petani/peternak;

- 12) Penekanan alih fungsi lahan dan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian;
- 13) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI), pengendalian OPT dan Serangan penyakit hewan;
- 14) Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi untuk hilirisasi pertanian;
- 15) Menekan proporsi kehilangan hasil dalam proses produksi, panen dan pasca panen; dan
- 16) Optimalisasi nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

1.5. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

- 1) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014;
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 11) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2026;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
- 27) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 28) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
- 29) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- 30) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 27);
- 32) Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- 33) Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/185/Kpts/BPT-PS/2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan

Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025; dan

- 34) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900.1.3/414/Distan/2025 tanggal 04 Juni 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900.1.3/21/Distan/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Pada sub bab ini disajikan klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

3.3 Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Pada sub bab ini disajikan analisa capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD, diwujudkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih dalam waktu yang telah ditentukan. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”**.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

- SEJAHTERA** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
- MAJU** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung

sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.

BERMARTABAT : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pakerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)

AKUNTABEL : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

PROFESIONAL : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

2.1.2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
- 3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;

- 5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing; dan
- 6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Berdasarkan keenam misi tersebut, dapat dilihat bahwa Misi Kesatu dan Misi Ketiga berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, yakni :

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan; dan
- 2) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Pada tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kajian Rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2021-2026. Kajian yang dilakukan adalah mereviu penggunaan indikator utama dan indikator kinerja perangkat daerah terhadap RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan yang dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah tahun 2021-2026.

Selanjutnya melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 050/0034/PPEPD-Bapedalitbang/l/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Rasionalisasi Target Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan penyusunan pohon kinerja Perangkat Daerah, rasionalisasi Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Dari hasil rasionalisasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Rasionalisasi Target Kinerja Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja											
			Sebelum Rasionalisasi					Setelah Rasionalisasi						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian	-	-	65 (B)	66 (B)	67 (B)	68 (B)	-	-	-	-	-	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	88,20 (A)	88,64 (A)	89,09 (A)	89,53 (A)	89,98 (A)	90,43 (AA)	88,20 (A)	88,64 (A)	89,09 (A)	89,53 (A)	89,98 (A)	90,43 (AA)
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	-	85	100	100	100	100	-	85	100	100	100	100
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Rp. 2,90 Trilyun	Rp. 2,98 Trilyun	Rp. 3,04 Trilyun	Rp. 3,10 Trilyun	Rp. 3,16 Trilyun	Rp. 3,23 Trilyun	Rp. 2,90 Trilyun	Rp. 2,98 Trilyun	Rp. 3,04 Trilyun	Rp. 3,10 Trilyun	Rp. 3,16 Trilyun	Rp. 3,23 Trilyun	

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dilakukan rasionalisasi, karena nilai reformasi birokrasi hanya pada tingkat pemerintah daerah atau Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan hasil rasionalisasi maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan (Akhir Renstra)	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Nilai Tukar Petani (NTP)	109,29	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	88,20 (A)	88,64 (A)	89,09 (A)	89,53 (A)	89,98 (A)	90,43 (AA)
				Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	-	85	100	100	100	100
				Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Rp. 2,90 Trilyun	Rp. 2,98 Trilyun	Rp. 3,04 Trilyun	Rp. 3,10 Trilyun	Rp. 3,16 Trilyun	Rp. 3,23 Trilyun

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

2.2. RENCANA KINERJA

Kinerja memerlukan ukuran sehingga yang dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap standar atau target yang direncanakan. Ukurannya menggunakan indikator yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja yang baik memenuhi unsur spesifik (**S**pecific), terukur (**M**easurable), dapat dicapai secara rasional (**A**chievable), relevan dengan kebijakan yang sedang berjalan (**R**elevant), dan memperhitungkan batas waktu pencapaian (**T**ime-bound). yang disingkat dengan SMART, diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Spesific/Spesifik (S)*; indikator jelas dan focus (tidak menimbulkan multitafsir).
- 2) *Measurable/Terukur (M)*; dapat diukur dengan skala penilaian tertentu (kuantitas atau kualitas).
- 3) *Achievable (A)*; dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dengan metode yang sesuai, berada dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 4) *Result-Oriented/Relevant (R)*; terkait secara logis dengan kebijakan/program/kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- 5) *Time-Bound (T)*; memperhatikan rentang waktu pencapaian, untuk analisis perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya, dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Karena fitur atau metode SMART ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Analisis Situasi:

Pahami kondisi saat ini dari Dinas Pertanian, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.

- 2) Penetapan Tujuan:

Tentukan Tujuan yang jelas untuk Dinas pertanian yang akan membimbing penetapan target.

- 3) Tujuan Strategis:
Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.
- 4) Indikator Kinerja:
Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan - tujuan tersebut.
- 5) Target Spesifik:
Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.
- 6) Rencana Aksi:
Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.
- 7) Monitoring dan Evaluasi:
Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025, merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen teknis operasional.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					Awal	Revisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	A (89,98)	A (89,98)
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	100	91
		Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Rp. Trilyun	3,16	3,16

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka dukungan program/kegiatan sangat perlu diperhatikan seperti tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Program Pendukung Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula Penghitungan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Hasil Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pertanian oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Hasil Penilaian Saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi IGA	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Jumlah PDRB dari Sektor Pertanian Berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) Tahun	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Perizinan Usaha Pertanian Penyuluhan Pertanian

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja tahun 2025 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian. Perjanjian Kinerja tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada tahun 2025, dilakukan mekanisme pergeseran/perubahan

anggaran sehingga anggaran yang tidak terserap pada beberapa kegiatan dapat dialihkan dan dimaksimalkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang lain. Pergeseran/perubahan anggaran tercantum dalam dokumen pergeseran/perubahan anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Awal	Revisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	A (89,98)	A (89,98)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	100	91
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3,16 Triliyun	3,16 Triliyun

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dilihat dari tabel 2.5 di atas, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian, target dihitung berdasarkan hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pertanian oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2) Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian, target dihitung berdasarkan hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA; dan
- 3) Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK), target dihitung berdasarkan jumlah PDRB dari sektor pertanian berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun.

Dari ke-3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan beserta targetnya, target kinerja nilai kematangan inovasi daerah dilakukan revisi dari target awal 100 menjadi 91 yang mempedomani:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 pasal 24 ayat (2) huruf (b) yang berbunyi: realisasi pencapaian target Kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD dan huruf (c) yang berbunyi: penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja; dan

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 347 Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas: a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan b. Penyajian rancangan perubahan RKPD

Berdasarkan kedua peraturan diatas dan memperhatikan capaian kinerja tahun 2024 hanya mencapai 90 dari target 100 (capaian hanya 90%) serta ketersediaan sumberdaya yang terbatas, maka dilakukan revisi target semula 100 menjadi 91 yang berada 1 point diatas capaian tahun 2024. Dengan dilakukannya revisi target, diharapkan capaian kinerja indikator ini bisa tercapai dengan upaya peningkatan kualitas inovasi lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.6

Program dan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Target		Anggaran (Rp)
			Awal	Revisi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	A (89,98)	A (89,98)	17.139.080.029
2.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	100	91	5.168.662
3.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3.16 Triliyun	3.16 Triliyun	128.110.150
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				970.967.800
	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				24.469.910
	Perizinan Usaha Pertanian				33.296.226
	Penyuluhan Pertanian				534.263.218
Jumlah					18.835.355.995

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian tahun 2025. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

No	Misi	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2025			
					Target		Realisasi	%
					Awal	Revisi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	A (89,98)	A (89,98)	A (89,50)*	99,47
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	100	91	92	101,10
2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliyun	3,16	3,16	3,09*	97,78
Rata-rata capaian (%)								99,45

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 ini ada 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 yaitu:

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dengan target A (89,98).

Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian adalah A (89,50) atau sebesar 99,47% dengan predikat **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian ini memakai nilai evaluasi tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian tahun 2025 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja tahun 2025 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret tahun 2026.

- 2) Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian dengan target 91.

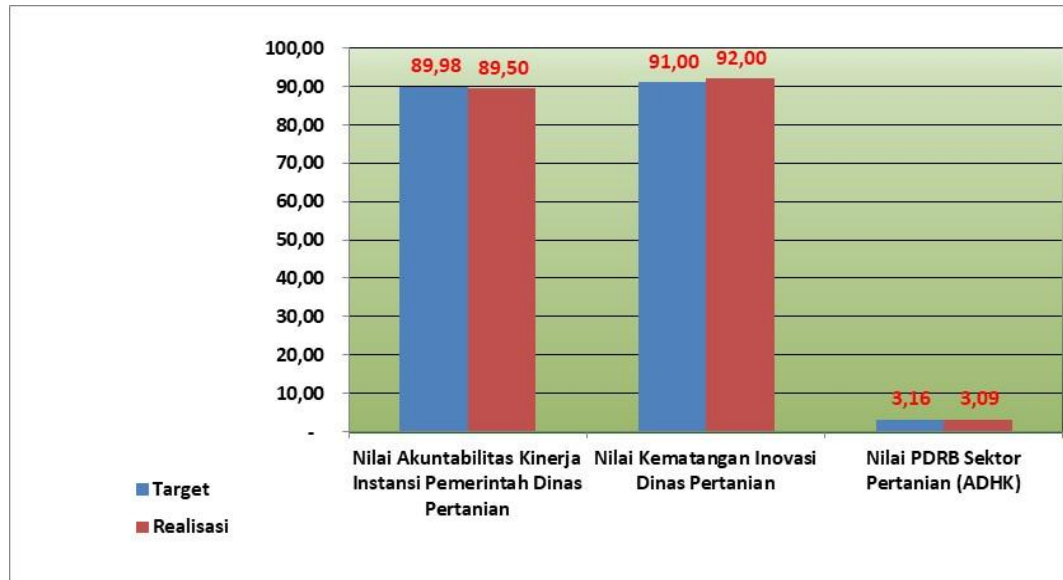
Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian adalah 92 atau sebesar 101,10% dengan predikat **sangat baik**.

- 3) Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) dengan target 3,16 triliyun.

Capaian indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) adalah 3,09 triliyun atau sebesar 97,78% dengan predikat **sangat baik**. Realisasi Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tahun 2025 memakai Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tahun 2024 dikarenakan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tahun 2025 dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan pada bulan April tahun 2026.

Capaian rata-rata ke 3 (tiga) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 99,45% dengan predikat **sangat baik**. Grafik capaian kinerja per indikator dapat dilihat pada grafik 3.1 dibawah ini:

Grafik 3.1
Capaian Kinerja Per Indikator Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025



Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Pertanian tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan
Berkinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	A (89,98)	A (89,50)*	99,47
Rata-rata capaian (%)						99,47

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian tahun 2025 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian tahun 2025 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

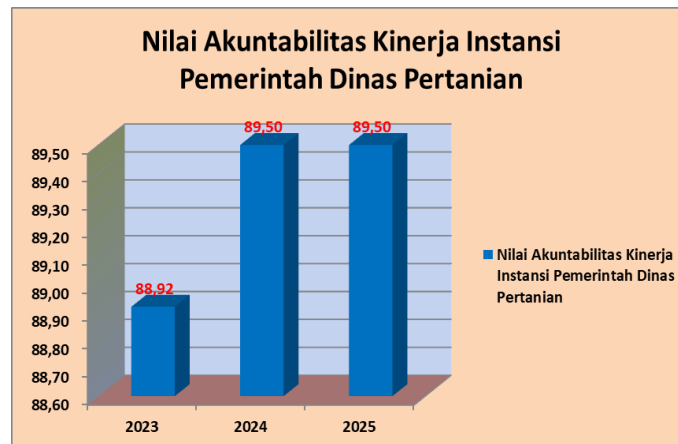
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	A (88,92)	A (89,50)	A (89,50)*

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Pada grafik 3.2 dibawah ini dapat dilihat tren capaian kinerja pada indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian tahun 2023 s.d 2025 sebagai berikut:

Grafik 3.2
Tren Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2023 s.d 2025



Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari grafik 3.2 dapat dijelaskan bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dari tahun 2023 s.d 2025 cenderung menunjukkan tren positif, artinya kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selalu meningkat dari tahun ke tahun.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	A (89,50)*	AA (90,43)	98,97	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai Sakip Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumbar	Kementerian Pertanian Republik Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tanpa Satuan	A (89,50)*	BB (73,03)*	BB*

Catatan: *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber: 1. Dinas Perkebunan, TP dan Hortikultura Prov. Sumbar Tahun 2026

2. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pertanian Kab. Pessel Tahun 2026

3. <http://1data.menpan.go.id>

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

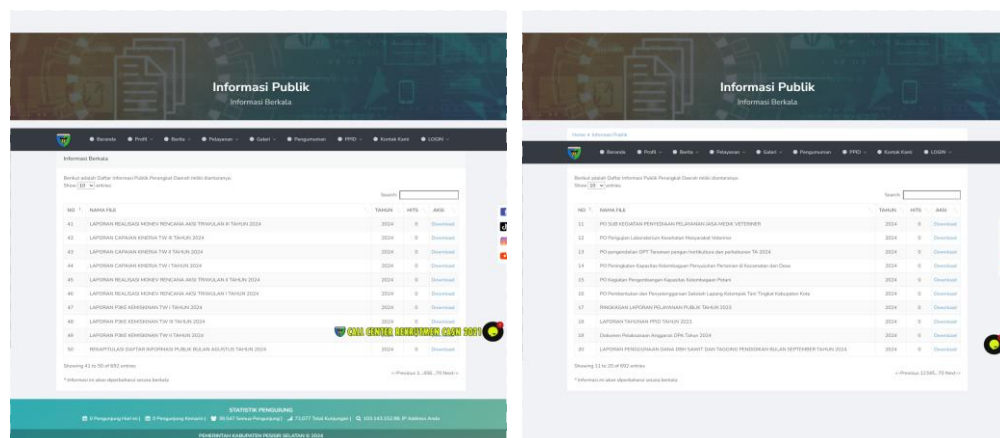
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://disperta.pesisirselatankab.go.id> dengan tampilan sebagai berikut:



Gambar 3.1 : Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 3.2 : Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian **reward** dan **punishment**. Dinas Pertanian selama Tahun 2025 telah memberikan **reward** dan **punishment** terhadap capaian kinerja bawahan. Dalam hal ini, Dinas Pertanian menilai kinerja bawahannya melalui keterlibatan langsung terhadap peningkatan nilai evaluasi sakin tahun 2024, reward yang diberikan berupa sertifikat penghargaan seperti pada gambar 3.3 dibawah ini:





Gambar 3.3 : Sertifikat Penghargaan ASN yang Berprestasi Tahun 2025

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada gambar 3.4, 3.5 dan 3.6 dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi dan pemberian piagam penghargaan atas capaian hasil evaluasi LKj “Terbaik III” dan Laporan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) “Terbaik I” tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 3.4 : Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi



Gambar 3.5 : Sertifikat Terbaik I RKPd Tahun 2024 (gambar kanan) dan Sertifikat Terbaik I Nilai AKIP Tahun 2024 (gambar kiri)



Gambar 3.6 : Penyerahan Sertifikat Penghargaan Atas Pencapaian Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2024 oleh Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik dan berjenjang melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti gambar 3.7 dan 3.8 dibawah ini:





Gambar 3.7 : Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala (Triwulan I s.d Triwulan IV) Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Tingkat Dinas



Gambar 3.8 : Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Tingkat Bidang-Bidang

Semua pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten selama tahun 2025 dilakukan publikasi pada media sosial yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Youtube



: Pertanian pessel



Gambar 3.9 : Youtube Dinas Pertanian

2. Facebook



: Dinas Pertanian Kab Pessel (Dinas pertanian pessel)



Gambar 3.10 : Facebook Dinas Pertanian

3. Instagram



: [dinaspertanian.pessel](https://www.instagram.com/dinaspertanian.pessel)



Gambar 3.11 : Instagram Dinas Pertanian

4. Tiktok



: <http://www.tiktok.com/@dinaspertanian.pessel>



Gambar 3.12: Tiktok Dinas Pertanian

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	A (89,98)	A (89,50)*	99,47	17.139.080.029	16.890.801.788	98,55	0,92

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100 \%$$

$$\frac{(\text{Rp.17.139.080.029} \times 99,47\%) - \text{Rp.16.890.801.788}}{\text{Rp.17.139.080.029} \times 99,47\%} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Rp. 17.048.242.905} - \text{Rp.16.890.801.788}}{\text{Rp. 17.048.242.905}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Rp.157.441.117}}{\text{Rp.17.048.242.905}} \times 100 \% = 0,92 \%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,92%.

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	29,06
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,36
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,12
4	Evaluasi Internal	25,00	21,38
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja		100,00	
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.			88,92
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)			A

Gambar 3.13 : Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian

tahun 2025 adalah A (89,98), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas Pertanian tahun 2024 sebesar A (89,50) serta untuk capaian kinerja sebesar 99,47%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,65% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar A (88,92). Peningkatan nilai ini didorong dengan adanya peningkatan 3 (tiga) komponen yang dinilai dari total 4 (empat) komponen yang dinilai yaitu:

- 1) Pengukuran kinerja dari 25,36 meningkat menjadi 26,40 (4,10%);
- 2) Pelaporan Kinerja dari 13,12 meningkat menjadi 13,37 (1,90%); dan
- 3) Evaluasi Internal dari 21,38 meningkat menjadi 22,38 (4,47%).

Satu komponen penilaian mengalami penurunan yaitu perencanaan kinerja sebesar 5,85% (dari 29,06 turun menjadi 27,36).

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas Pertanian tahun 2025 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu:

- 1) Perencanaan Kinerja
Agar melakukan monitoring capaian kinerja pada seluruh kriteria yang telah ditetapkan dilaksanakan setiap bulan.
- 2) Pengukuran Kinerja
 - a) Agar mendorong seluruh Unit/Satuan Kerja dan Pegawai untuk peduli dan berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang lebih baik sesuai target yang telah ditetapkan; dan

II. HASIL EVALUASI

A. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh nilai **89,50** dengan kategori **A (Memuaskan)** dengan Pengertian Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator, dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,36
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,40
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,37
4	Evaluasi Internal	25,00	22,38
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja		100,00	
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.			89,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)			A

Gambar 3.14 : Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

- b) Agar setiap level organisasi melakukan secara maksimal pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala.
- 3) Pelaporan Kinerja
 - a) Agar penyajian informasi dalam proses laporan kinerja sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai; dan
 - b) Agar informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan diharapkan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja serta melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

Dari 6 (enam) rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar 3.15 dibawah ini:

PEMERINTAH KABUPATEN PESIIR SELATAN
DINAS PERTANIAN
Jalan Diponegoro, Paimon, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimili: (0756) 21409 Paimon
Laman: www.pesisirselatankab.go.id, Post-elt@pesisirselatankab.go.id

Paimon, 17 Juni 2025


Nomor : 000.8.6.3/326/Distan/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 700.1.2.1/827/INSP/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal sama dengan pokok diatas, maka bersama ini dikirimkan dokumen tindaklanjut dimaksud seperti daftar terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pertanian


MADRINTO S.Hut, MH
NIP. 191780519 2005011 009


Lampiran : Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 000.8.6.3/326/Distan/2025
Tanggal : 17 Juni 2025

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIIR SELATAN

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Perencanaan Kinerja						
1	Agar melakukan monitoring capaian kinerja pada seluruh kantor yang telah ditetapkan dilaksanakan setiap bulan	Raport monitoring dan evaluasi capaian kinerja	Per bulan	Tahun 2025	Sekretariat	Dalam proses pelaksanaan
II. Pengukuran Kinerja						
3	Agar mendorong seluruh Unit/Subunit Kerja dan Pegawai untuk peduli dan bertanggung dalam pencapaian kinerja yang lebih baik sesuai target yang telah ditetapkan	Raport monitoring dan evaluasi capaian kinerja sesuai perjanjian kinerja masing-masing pegawai	Per bulan	Tahun 2025	Seluruh Bidang	Dalam proses pelaksanaan
5	Agar setiap level organisasi melakukan secara maksimal pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala	Raport monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berjenjang	Per bulan	Tahun 2025	Seluruh Bidang	Dalam proses pelaksanaan
III. Pelaporan Kinerja						
4	Agar penyajian informasi dalam proses laporan kinerja sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai	Raport penyusunan laporan kinerja secara berjenjang	1 kali	Tahun 2025	Sekretariat	Selesai
5	Agar informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan diharapkan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Raport penyampaian hasil evaluasi laporan kinerja	1 kali	Tahun 2025	Sekretariat	Dalam proses pelaksanaan

pernyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan diharapkan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	laporan seluruh pegawai dalam rangka penyusunan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi	1 kali	Tahun 2025	Sekretariat	Dalam proses pelaksanaan
IV. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
Agar hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja serta melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja	Raport realisasi laporan hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah kepada seluruh pegawai untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja serta melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja	1 kali	Tahun 2025	Sekretariat	Dalam proses pelaksanaan

Kepala Dinas Pertanian


MADRINTO S.Hut, MH
NIP. 191780519 2005011 009

Gambar 3.15 : Tindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pertanian Tahun 2024

49

Laporan Kinerja Tahun 2025

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini ada 1 (satu) kegiatan dengan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

- e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
Sub Kegiatan:
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.



Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian tahun 2025 adalah sebesar Rp.16.890.801.788 atau 98,55% dari total anggaran sebesar Rp.17.139.080.029, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 1,45%.



SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	91	92	101,10
Rata-rata capaian (%)						101,10

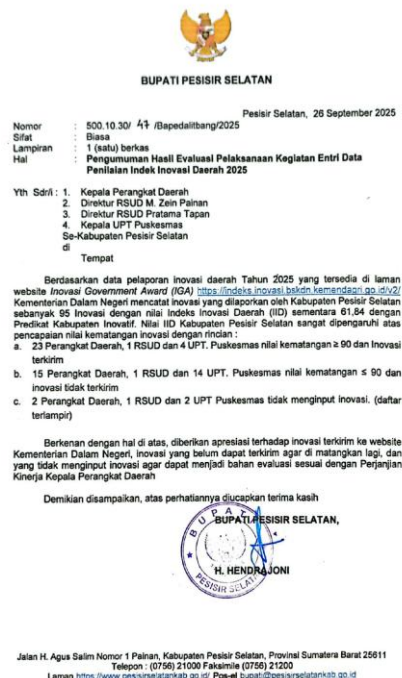
Sumber : Bidang Penyuluhan Pertanian Tahun 2026.



Gambar 3.16 : Sertikat Penghargaan Inovasi Tahun 2025

Dari tabel 3.8 dan diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian mencapai 92 dari target 91 atau tingkat capaiannya mencapai 101,10%. Inovasi yang

divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri yaitu “Sapa Penyuluh Pasisia” dengan predikat **tinggi** yang sudah tahap implementasi sejak tahun 2024. **Sapa Penyuluh Pasisia** adalah suatu inovasi pada Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Pada gambar 3.17 dibawah ini dapat dilihat surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 500.10.30/47/Bapedalitbang/2025 tanggal 26 September 2025 tentang Pengumuman Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Entri Data Penilaian Indeks Inovasi Daerah 2025 sebagai berikut:



NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil Validasi	Nomor Registrasi (Kemendagri)
5.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Optimalisasi Penerapan Elektronik Retribusi Pasar (E-Pas)	Inovasi pelayanan publik	93,00	Terlirim	13.01-117333-2023
6.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SILAT TABANG - Slip Layanan Tera Takaran TimBANgan	Inovasi pelayanan publik	8,00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	E-Perencanaan (E-Salip)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	93,00	Terlirim	13.01-151955-2024
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wulan (Wisuda Lansia)	Inovasi pelayanan publik	93,00	Terlirim	13.01-162559-2024
8.	Dinas Pertanian	Sapa Penyuluh Pasisia	Inovasi pelayanan publik	92,00	Terlirim	13.01-142974-2024
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Valaris Duren Pongor	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	78,00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KLKIK LKPM	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	92,00	Terlirim	13.01-142046-2024
		#ONIT4 PTSP	Inovasi pelayanan publik	74,00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-

Gambar 3.17: Surat Pengumuman Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Entri Data Penilaian Indeks Inovasi Daerah 2025

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	92	90	92

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026.

Dari tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,17% dari 90 pada tahun 2024 menjadi 92 pada tahun 2025. Pada grafik 3.3 dibawah ini dapat dilihat tren capaian kinerja pada indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian tahun 2025 sebagai berikut:

Grafik 3.3
Tren Capaian Kinerja Pada Indikator Nilai Kematangan Inovasi
Dinas Pertanian Tahun 2023 s.d 2025



Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari grafik 3.3 dapat dijelaskan bahwa Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian dari tahun 2023 s.d 2025 cenderung menunjukkan fluktuatif, naik turunnya nilai kematangan inovasi ini dipengaruhi oleh ketersediaan dating dukung dan kualitas inovasi terkait.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	92	100	92	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Bidang Penyuluhan Pertanian Tahun 2026

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	91	92	101,10	Tercapainya target inovasi tahun 2025 dikarenakan adanya revisi target dari 100 menjadi 91, namun idealnya capaian target bisa mencapai nilai 95 s.d 100 dengan syarat terpenuhinya semua kriteria penilaian salah satunya adanya replikasi oleh daerah lain	Meningkatkan nilai kematangan inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital, terintegrasi, bersifat umum dan adanya replikasi oleh daerah lain

Sumber : Bidang Penyuluhan Pertanian Tahun 2026

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.12
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	91	92	101,10	5.168.662	0	0	100

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Rp.5.168.662} \times 101,10\%) - 0}{\text{Rp.5.168.662} \times 101,10\%} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp.5.225.517,28}}{\text{Rp.5.225.517,28}} \times 100\% = 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 100%.

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian tahun berikutnya adalah :

- 1) Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
- 2) Evaluasi komitmen kinerja inovasi;
- 3) Manajemen inovasi; dan
- 4) Keberlanjutan inovasi.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian sebesar Rp.5.168.662, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 100%.



Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan indikator kinerjanya yaitu Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK).

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.13 dibawah ini.

Tabel 3.13
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliyun	3,16	3,09*	97,78
Rata-rata capaian (%)						97,78

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Dari tabel 3.13 diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tahun 2025 menggunakan angka capaian tahun 2024 dengan tingkat capaian sebesar 97,78% dengan predikat **Sangat Baik**.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.14 dibawah ini:

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3,05 Triliyun	3,09 Triliyun	3,09 Triliyun*

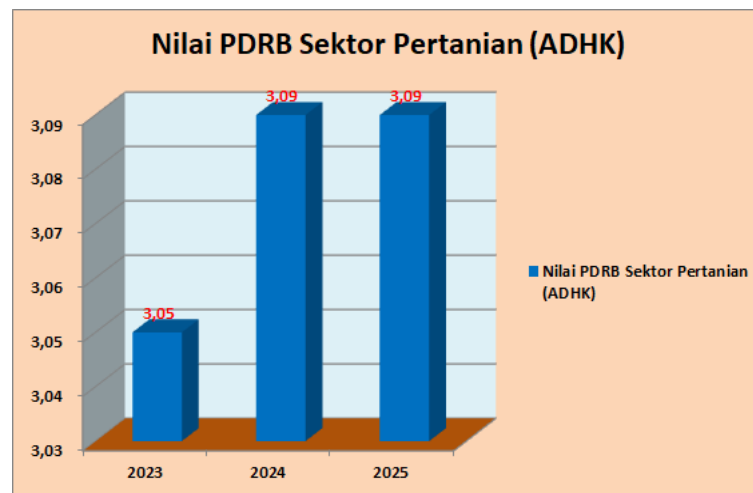
Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Dari tabel 3.14 diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB sektor pertanian (ADHK) selalu menunjukkan trend positif. Nilai PDRB sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 1,31% pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pada grafik 3.5 dibawah ini dapat dilihat capaian Nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK) dan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tahun 2023 s.d tahun 2025 sebagai berikut:

Pada grafik 3.4 dibawah ini dapat dilihat tren capaian kinerja pada indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tahun 2025 sebagai berikut:

Grafik 3.4
Tren Capaian Kinerja Pada Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)
Tahun 2023 s.d 2025

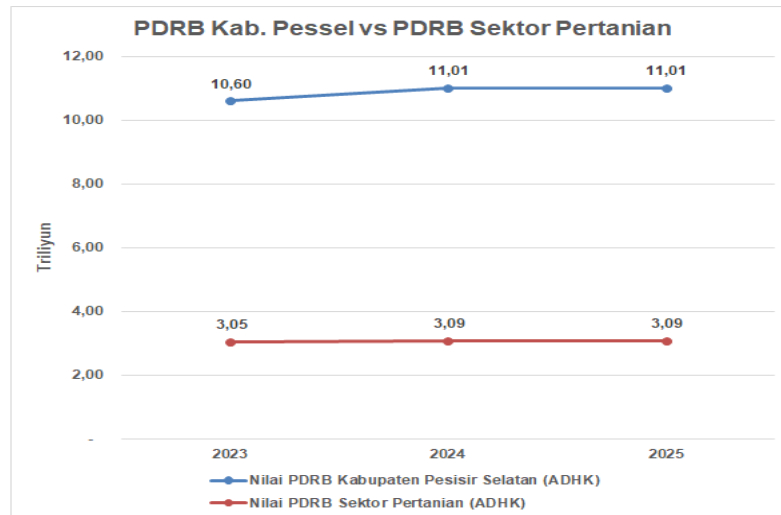


Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari grafik 3.4 dapat dijelaskan bahwa Nilai PDRB Sektor Pertanian dari tahun 2023 s.d 2025 cenderung menunjukkan tren positif, artinya kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selalu meningkat dari tahun ke

tahun terutama meningkatnya produksi pertanian yang merupakan kunci utama dalam penghitungan PDRB.

Grafik 3.5
Perbandingan Capaian PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK) dengan PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2023 s.d Tahun 2025

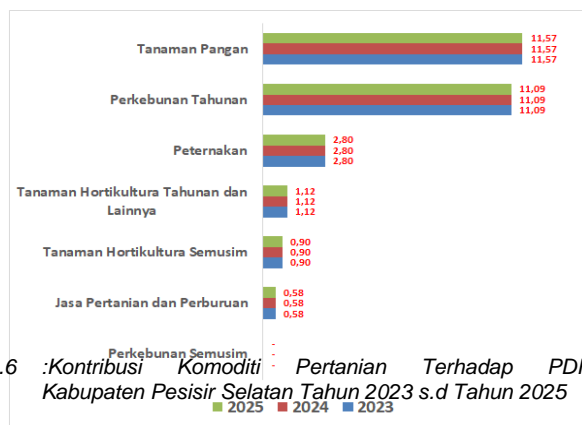


Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Dari Grafik 3.5 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK) dan nilai PDRB sektor pertanian (ADHK) mengalami

peningkatan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pertanian merupakan salah satu sektor paling berpengaruh di Kabupaten Pesisir Selatan yang terbukti dengan kontribusinya terhadap PDRB yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor

Grafik 3.6 :Kontribusi Komoditi Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 s.d Tahun 2025



lain. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Sektor Pertanian adalah tanaman pangan kemudian disusul oleh perkebunan tahunan, peternakan, tanaman hortikultura tahunan dan lainnya, tanaman hortikultura semusim, jasa pertanian dan perburuan. Tingginya kontribusi tanaman pangan dan perkebunan tahunan tidak lain disebabkan oleh komoditas padi, jagung dan kelapa sawit yang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.15 dibawah ini:

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3,09 Triliyun*	3,23 Triliyun	95,67	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, dapat dilihat pada tabel 3.16 dibawah ini:

Tabel 3.16
Perbandingan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliyun	3,09*	32,58*	1.197,47*

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Statistik Makro Sektor Pertanian Tahun 2025

Dari tabel 3.16 diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan terhadap PDRB Sektor

Pertanian (ADHK) Provinsi Sumatera Barat sebesar 9,48% dan PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Indonesia sebesar 0,25%, jika dilihat kontribusi terhadap PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia sangat kecil, tapi sektor pertanian menyumbangkan kontribusi yang terbesar terhadap PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) dapat dilihat pada tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel 3.17
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliyun	3,16	3,09*	97,78	Peningkatan nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tidak terlepas dari peningkatan produksi pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Meningkatkan produksi pertanian

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Capaian produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 s.d tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.18 dibawah ini:

Tabel 3.18
Capaian Produksi Pertanian Tahun 2023 s.d Tahun 2025
di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Komoditi	Produksi (Ton)		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025*
1	2	3	4	5
1	Padi	201.974,00	169.097,76	174.985,91
2	Jagung	147.741,00	127.627,94	160.604,40
3	Cabe Merah	4.975,05	3.841,46	3.348,06
4	Bawang Merah	453,25	71,05	30,80
5	Jeruk	4.412,20	3.866,10	3.303,70
6	Pisang	12.918,80	13.917,80	15.335,30
7	Durian	16.025,10	20.741,10	24.237,60
8	Manggis	3.373,70	3.482,10	8.029,80
9	Jengkol	6.297,20	8.207,70	6.206,40
10	Sawit	77.352,07	78.124,30	79.140,13
11	Kelapa	3.509,26	3.471,69	3.447,83
12	Kopi	2.506,22	2.510,08	2.605,60
13	Gambir	5.667,61	7.271,46	7.718,93
14	Pala	1.007,18	1.065,66	1.081,23
15	Daging Sapi	1.686,57	1.570,32	1.748,49
16	Daging Kerbau	53,30	37,29	72,57
17	Daging Kambing	21,22	18,14	19,99
18	Daging Ayam Buras	823,42	869,89	579,89
19	Daging Ayam Ras Pedaging	2.058,64	1.958,80	1.898,38
20	Daging Ayam Petelur	91,41	78,45	99,15
21	Daging Itik	298,77	90,99	81,73
22	Telur Ayam Buras	280,71	296,28	197,69
23	Telur Ayam Ras Petelur	639,16	548,57	693,28
24	Telur Itik	2.789,52	849,58	763,10
	Jumlah Total	496.955,36	449.614,51	496.229,97

Catatan : *) Angka Sementara Tahun 2025

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari tabel 3.18 diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa komoditi yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Naik dan turunnya produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1) Luas Lahan

Luas lahan merupakan poin penting terhadap produksi komoditas pertanian. Secara umum, luas lahan berbanding lurus dengan produksi

sehingga untuk meningkatkan produksi maka langkah konsevatif yang diambil adalah memperluas lahan, namun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, lahan pertanian mulai tergeser dengan lahan pemukiman sehingga produksi pertanian pun terganggu. Pada tabel 3.19 dibawah ini dapat dilihat luas lahan sawah per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.19
Luas Lahan Sawah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

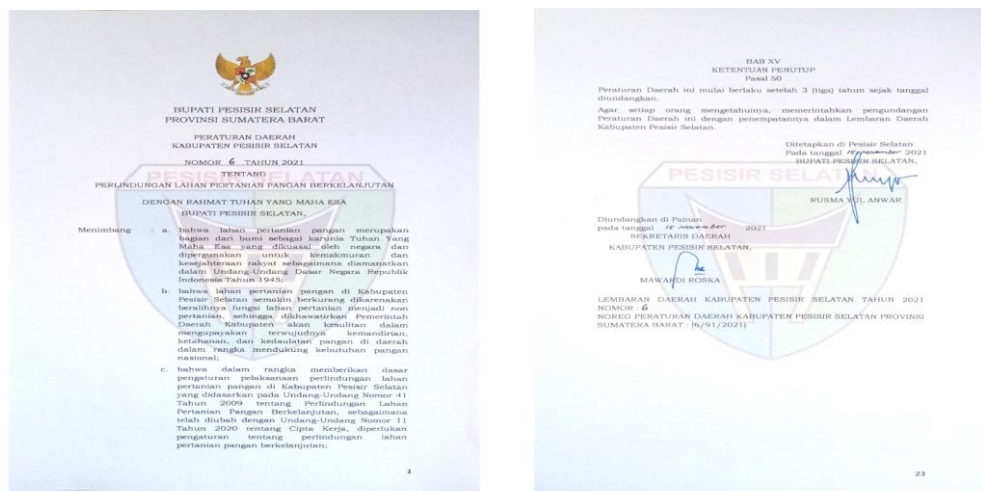
No	Kecamatan	Irigasi (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Pasang Surut (Ha)	Lebak (Ha)	Jumlah (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Silaut	-	-	-	-	-
2	Lunang	676,62	300,65	-	-	977,27
3	BAB Tapan	1.020,89	207,43	-	-	1.228,32
4	Rahul Tapan	636,57	18	-	-	654,57
5	Pancung Soal	1.211,99	51	-	-	1.262,99
6	Airpura	558,50	-	32	-	590,50
7	Linggo Sari Baganti	772,98	1.710,20	-	-	2.483,18
8	Ranah Pesisir	1.501,07	1.172,15	-	-	2.673,22
9	Lengayang	2.597,56	507,16	-	33	3.137,72
10	Sutera	1.829,94	699,26	7	19	2.555,20
11	Batang Kapas	1.438,98	462,42	-	-	1.901,40
12	IV Jurai	1.296,60	37	-	-	1.333,60
13	Bayang	1.628,19	353,22	-	-	1.981,41
14	Bayang Utara	329,24	59,09	-	-	388,33
15	Koto XI Tarusan	964,29	699,72	-	-	1.664,01
Jumlah		16.463,42	6.277,30	39	52	22.831,72

Sumber : Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2026

Untuk mempertahankan lahan sawah dari alih fungsi lahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda ini mengatur penggunaan lahan pertanian pangan agar tidak dialih fungsikan ke penggunaan selain komoditi pangan seperti tanaman perkebunan, perumahan, fasilitas umum dan lain-lain. Didalam Perda ada 3 (tiga) kelas lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yaitu :

- 1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- 2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B); dan
- 3) Lahan Rawan Konversi.

Bagi individu dan badan usaha yang akan memanfaatkan lahan pertanian yang bukan untuk komoditi pangan harus mendapatkan rekomendasi pemanfaatan dari Dinas Pertanian, jika lahan tersebut masuk lahan yang dilindungi maka Dinas Pertanian tidak memberikan rekomendasi pemanfaatan lahan tersebut begitu juga sebaliknya. Sejak penerapan Perda ini, telah banyak usulan pemanfaatan yang diajukan oleh individu dan badan usaha sehingga telah dapat mengendalikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari alih fungsi lahan. Pada gambar 3.18 dibawah ini dapat dilihat tampilan Perda LP2B tersebut sebagai berikut:



Gambar 3.18 : Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

2) Produktivitas Tanaman

Menurut FAO (*Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa*) Produktivitas tanaman adalah ukuran dari jumlah hasil yang dihasilkan oleh tanaman tertentu dalam satuan luas tanah atau per unit input tertentu, seperti air, pupuk, atau tenaga kerja, dalam jangka waktu tertentu. Produktivitas tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal.

Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana tanaman dapat menghasilkan hasil yang optimal.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi produktivitas tanaman:

a) Faktor Internal

Genetika Tanaman: Genetika tanaman adalah faktor internal yang paling mendasar. Varietas atau jenis tanaman yang digunakan akan memiliki karakteristik genetik tertentu yang memengaruhi produktivitasnya, seperti resistensi terhadap penyakit, ukuran hasil, dan potensi pertumbuhan.

Umur Tanaman: Siklus hidup tanaman, termasuk fase pertumbuhan, berbunga, dan berbuah, memengaruhi jumlah hasil yang dapat dihasilkan. Tanaman yang memiliki siklus pendek mungkin lebih produktif karena dapat ditanam lebih sering dalam satu tahun.

Kesehatan Tanaman: Kesehatan tanaman, termasuk kebebasan dari penyakit dan serangga, sangat penting untuk produktivitas. Tanaman yang sehat cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik.

Nutrisi Tanaman: Ketersediaan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dalam tanah dapat memengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pemberian pupuk yang tepat dapat meningkatkan produktivitas.

Kerapatan Tanaman: Jarak antara tanaman (kerapatan tanam) dapat memengaruhi kompetisi untuk sumber daya seperti air, cahaya matahari, dan nutrisi. Kerapatan yang optimal perlu dipertimbangkan untuk mencapai produktivitas maksimum.

b) Faktor Eksternal

Lingkungan: Faktor lingkungan seperti cuaca, suhu, curah hujan, dan kelembaban udara memiliki dampak besar pada

produktivitas tanaman. Tanaman yang tumbuh dalam kondisi lingkungan yang sesuai akan lebih produktif.

Tanah: Kualitas tanah, termasuk tekstur, struktur, pH, dan kandungan bahan organik, mempengaruhi kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi. Tanah yang subur dan sehat mendukung produktivitas yang lebih tinggi.

Manajemen Pertanian: Cara tanaman dikelola, termasuk pemilihan varietas yang tepat, penggunaan pupuk dan pestisida, serta praktik irigasi dan pemeliharaan, berdampak besar pada produktivitas. Manajemen yang baik dapat meningkatkan hasil.

Pestisida dan Penyakit: Serangan hama dan penyakit dapat merusak tanaman dan mengurangi produktivitas. Kontrol hama dan penyakit yang efektif diperlukan untuk menjaga produktivitas tanaman.

Teknologi Pertanian: Penggunaan teknologi modern seperti irigasi berbasis sensor, pemantauan pertanian berbasis data, dan pemilihan varietas unggul dapat meningkatkan produktivitas tanaman.

Upaya Peningkatan Produktivitas Tanaman di Kabupaten Pesisir Selatan

Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Berikut adalah beberapa upaya peningkatan produktivitas tanaman di Kabupaten Pesisir Selatan:

1) Pemilihan Varietas Unggul

Memilih varietas tanaman yang memiliki sifat-sifat yang menguntungkan, seperti ketahanan terhadap penyakit, adaptabilitas terhadap kondisi lingkungan, dan hasil yang tinggi, dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Varietas Unggul Nasional yang sudah dilepaskan oleh Kementerian Pertanian RI yaitu Varietas Unggul Padi Sawah Bawaan Varietas Unggul Jengkol yaitu Jengkol Lokan Pessel dan

Jengkol Barih Pessel. Aktivitas-aktivitas penyaluran benih tanaman dapat dilihat pada gambar 3.19 dibawah ini:



Gambar 3.19 : Penyaluran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

2) Pemberian Pupuk yang Tepat

Menerapkan pemupukan yang tepat berdasarkan analisis tanah dan kebutuhan tanaman dapat memastikan bahwa tanaman mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang baik.

3) Pengelolaan Tanah yang Baik

Menerapkan praktik-praktik pengolahan tanah yang optimal, penanaman penutup tanah, dan penggunaan bahan organik dapat meningkatkan struktur tanah dan ketersediaan nutrisi.



Gambar 3.20 : Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian ke Kelompok Tani

4) Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Irigasi Tersier

Air merupakan faktor produksi utama pertanian, keberadaan dan berfungsinya infrastruktur air merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian khususnya padi, salah satu program yang harus dilaksanakan adalah rehabilitasi jaringan irigasi. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun. Pengelolaan irigasi harus memenuhi syarat kewenangan, diharapkan pada kesempatan ini seluruh stake holder terkait baik BWSS V, Provinsi dan Kecamatan dapat berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemecahan permasalahan terhadap kinerja sistem irigasi yang ada terutama pada kewenangan

kabupaten kota yang merupakan daerah irigasi dengan jumlah dan luas yang paling besar sehingga kedepan masalah rehabilitasi jaringan irigasi tersebut dapat kita cari solusinya. Aktivitas-aktivitas rehabilitasi jaringan irigasi tersier pada Tahun 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.21 dibawah ini:



Gambar 3.21 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Tahun 2025

Selain rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemenuhan akan air terhadap petani juga melalui pemberian bantuan pompa air terutama sawah-sawah tadah hujan.

5) Pengendalian Hama dan Penyakit

Menggunakan teknik pengendalian hama dan penyakit yang efektif, termasuk pemilihan varietas tahan penyakit dan pemantauan teratur, dapat mencegah kerugian hasil yang signifikan.

6) Praktik Penanaman yang Tepat

Mengatur jarak tanam yang sesuai, kedalaman penanaman, dan waktu tanam berdasarkan pada varietas dan kondisi lingkungan adalah kunci dalam meningkatkan produktivitas. Salah satu teknologi budidaya yang dipakai petani di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sistem tanam “Jajar Legowo”. sistem jajar legowo ada beberapa jenis yang biasa diterapkan oleh petani di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu “Jajar Legowo 2:1, 3:1 dan 4:1”. Berdasarkan hasil yang didapatkan jajar legowo 2:1 dapat

meningkatkan produksi mencapai 33 persen, jajar legowo 3:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 25 persen dan jajar legowo 4:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 18 persen. Aktivitas penanaman jajar legowo di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat seperti gambar 3.22 dibawah ini:



Gambar 3.22 : Penanaman sistem Jajar Legowo 2:1 (sebelah kiri) dan Jajar Legowo 3:1 (sebelah kanan)

7) Pemangkasan

Pemangkasan tanaman dengan benar dapat merangsang pertumbuhan tunas baru, memaksimalkan pemanfaatan cahaya matahari, dan meningkatkan hasil tanaman yang dibudidayakan. Aktivitas pemangkasan dapat dilihat pada gambar 3.23 dibawah ini:



Gambar 3.23 : Pemangkasan tanaman upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman

8) Penggunaan Teknologi Pertanian

Menerapkan teknologi modern seperti pemantauan berbasis data, aplikasi mobile, dan sistem irigasi otomatis dapat membantu meningkatkan manajemen pertanian dan mengoptimalkan produktivitas. Aktivitas penggunaan drone dalam pemantauan berbasis data terhadap luas tanam tanaman pangan seperti gambar 3.24 dibawah ini:



Gambar 3.24 : Pemantauan luas tanam padi sawah menggunakan drone

9) Perlindungan Terhadap Cuaca Ekstrem

Menyediakan perlindungan fisik, seperti rumah kaca atau jeruji, dapat membantu melindungi tanaman dari cuaca ekstrem, yang dapat merusak hasil.

10) Pelatihan dan Pendidikan

Memastikan bahwa petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam manajemen pertanian yang efektif sangat penting. Pelatihan dan pendidikan pertanian dapat membantu dalam menerapkan teknik-teknik yang benar. Aktivitas peningkatan kapasitas petugas dan petani/kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 3.25 dibawah ini:



Gambar 3.25 : Pendidikan dan pelatihan petugas dan kelompok tani Tahun 2025

3) Peningkatan Populasi Ternak

Peningkatan produksi peternakan baik itu daging maupun telur salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan jumlah populasi ternak. Upaya peningkatan populasi ternak yang dilakukan adalah pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) oleh tenaga Inseminator dimana target setiap tahunnya sebanyak 10.000 straw dan bantuan ternak ke peternak. Aktivitas Inseminasi Buatan oleh Inseminator dapat dilihat pada gambar 3.26 dibawah ini:



Gambar 3.26 : Aktivitas peningkatan populasi ternak unggul melalui Inseminasi Buatan (IB) oleh Inseminator Tahun 2025

Aktivitas penyaluran ternak ke Kelompok Tani dapat dilihat pada gambar 3.27 dibawah ini :



Gambar 3.27 : Penyaluran ternak ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.20
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3,16 Trilyun	3,09 Trilyun*	97,78	1.691.107.304	1.607.624.402	95,06	2,78%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Rp.1.691.107.304} \times 97,78\%) - \text{Rp.1.607.624.402}}{\text{Rp.1.691.107.304} \times 97,78\%} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp.1.653.564.721,90} - \text{Rp.1.607.624.402}}{\text{Rp.1.653.564.721,90}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp.45.940.319,90}}{\text{Rp.1.653.564.721,90}} \times 100\% = 2,78\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 2,78%.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu:

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
 1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman.
 - c. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
 1. Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian, kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian.
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian, kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani; dan
 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.
 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Perizinan Usaha Pertanian. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian.
5. Program Penyuluhan Pertanian. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa; dan
 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.

Upaya peningkatan capaian kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tahun berikutnya yaitu prioritas program dan kegiatan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam meningkatkan produksi pertanian/peternakan dan menumbuhkembangkan “**Petani Milenial**”, karena tenaga kerja salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan nilai PDRB sektor pertanian.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) adalah sebesar Rp.1.607.624.402 atau 95,06% dari total anggaran sebesar Rp.1.691.107.304, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 4,94%.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 untuk

melaksanakan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 pada tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.21
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 yang Menunjang Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Pertanian	A (89,98)	A (89,50)	99,47	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.993.127.625	17.139.080.029	16.890.801.788	98,55	Nilai AKIP Dinas Pertanian Tahun 2024
						<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>379.264.200</i>	<i>370.849.200</i>	<i>369.595.300</i>	99,66	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.208.750	16.598.750	16.285.400	98,11	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.489.000	6.664.000	6.494.500	97,46	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.489.000	6.664.000	6.516.700	97,79	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.894.950	4.894.950	4.794.000	97,94	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337.182.500	336.027.500	335.504.700	99,84	
						<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>16.301.787.945</i>	<i>15.347.405.599</i>	<i>15.140.640.421</i>	98,65	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.017.029.695	14.984.611.349	14.792.181.831	98,72	
						Penyediaan Administrasi	280.640.000	358.676.000	344.380.940	96,01	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.118.250	4.118.250	4.077.650	99,01	
						<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>24.865.225</i>	<i>24.865.225</i>	<i>24.524.700</i>	98,63	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24.865.225	24.865.225	24.524.700	98,63	
						<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>4.463.200</i>	<i>2.879.200</i>	<i>2.800.000</i>	97,25	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.463.200	2.879.200	2.800.000	97,25	
						<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>126.416.022</i>	<i>140.249.772</i>	<i>136.381.301</i>	97,24	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.663.552	5.663.552	5.569.980	98,35	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.952.680	34.952.680	34.292.890	98,11	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.353.140	6.260.340	5.300.242	84,66	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	5.400.000	5.400.000	100,00	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.950.000	3.300.000	3.300.000	100,00	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.355.000	81.355.000	79.256.599	97,42	

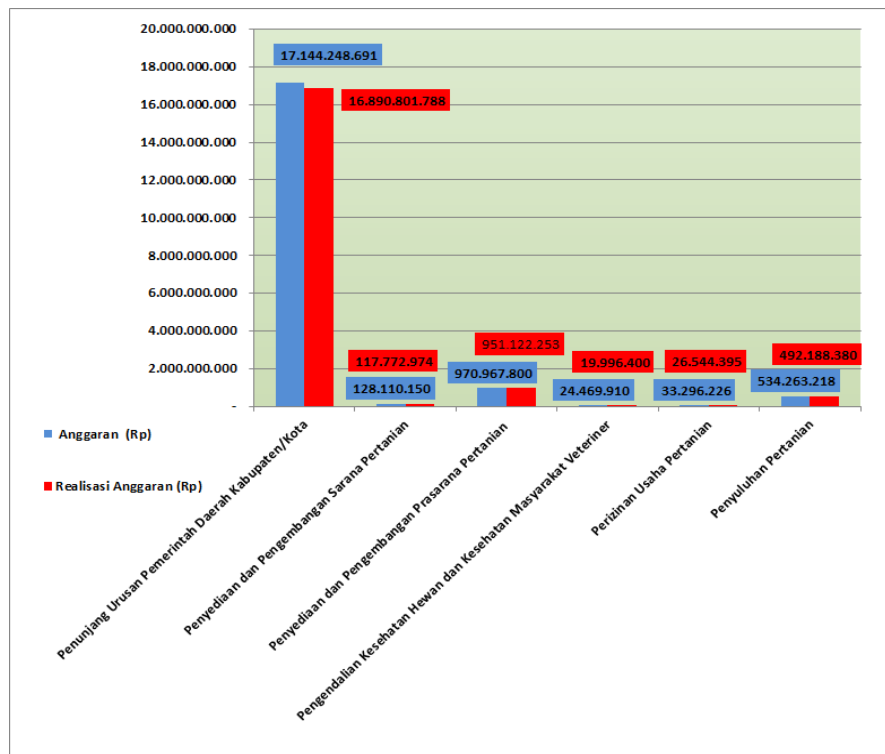


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.741.650	3.318.200	3.261.590	98,29	
						<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>28.175.000</i>	<i>28.175.000</i>	<i>27.998.640</i>	99,37	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.175.000	28.175.000	27.998.640	99,37	
						<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>985.266.033</i>	<i>1.084.416.033</i>	<i>1.056.331.991</i>	97,41	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.900.000	133.930.000	117.898.758	88,03	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	841.366.033	950.486.033	938.433.233	98,73	
						<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>142.890.000</i>	<i>140.240.000</i>	<i>134.207.235</i>	95,70	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	40.690.000	40.690.000	36.831.950	90,52	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	91.200.000	91.200.000	89.025.285	97,62	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.000.000	8.350.000	8.350.000	100,00	
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas	91	92	101,10	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.136.612	5.168.662	-	-	
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3,16 Trilyun	3,09 Trilyun	97,78	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	123.590.000	128.110.150	117.772.974	91,93	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2024
						<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>70.000.000</i>	<i>70.000.000</i>	<i>66.954.313</i>	95,65	
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	70.000.000	70.000.000	66.954.313	95,65	
						<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>23.590.000</i>	<i>28.110.150</i>	<i>21.806.765</i>	77,58	
						Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	23.590.000	28.110.150	21.806.765	77,58	
						<i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.000.000</i>	<i>29.011.896</i>	96,71	
						Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	30.000.000	30.000.000	29.011.896	96,71	
						Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	977.567.800	970.967.800	951.122.253	97,96	
						<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>677.567.800</i>	<i>670.967.800</i>	<i>654.140.186</i>	97,49	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	677.567.800	670.967.800	654.140.186	97,49	
						<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	<i>300.000.000</i>	<i>300.000.000</i>	<i>296.982.067</i>	98,99	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	100.000.000	100.000.000	99.639.522	99,64	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	200.000.000	200.000.000	197.342.545	98,67	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	24.469.910	24.469.910	19.996.400	81,72	
						<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah</i>	<i>24.469.910</i>	<i>24.469.910</i>	<i>19.996.400</i>	81,72	
						Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah	24.469.910	24.469.910	19.996.400	81,72	
						Perizinan Usaha Pertanian	33.296.226	33.296.226	26.544.395	79,72	
						<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah</i>	<i>33.296.226</i>	<i>33.296.226</i>	<i>26.544.395</i>	79,72	
						Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	33.296.226	33.296.226	26.544.395	79,72	
						Penyuluhan Pertanian	573.586.168	534.263.218	492.188.380	92,12	
						<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>573.586.168</i>	<i>534.263.218</i>	<i>492.188.380</i>	92,12	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	431.562.200	431.562.200	410.668.420	95,16	
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	142.023.968	102.701.018	81.519.960	79,38	
						Total	19.735.774.341	18.835.355.995	18.498.426.190	98,21	

Sumber : *Bagian Keuangan Tahun 2026*

Grafik 3.7
Realisasi Anggaran Per Program
Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025



Sumber : *Bagian Keuangan Tahun 2026*

Dari tabel 3.21 dan grafik 3.7 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Plafon anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.18.835.355.995 dan terealisasi sebesar Rp.18.498.426.190 atau sebesar 98,21%.
- 2) Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan kegiatan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.336.929.805 atau sebesar 1,79%.
- 3) Efisiensi penggunaan sumber daya selama pelaksanaan kegiatan tahun 2025 oleh Dinas Pertanian adalah:

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Rp.18.835.355.995} \times 99,45\%) - \text{Rp.18.498.426.190}}{\text{Rp.18.835.355.995} \times 99,45\%} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp.18.731.761.537} - \text{Rp.18.498.426.190}}{\text{Rp.18.731.761.537}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp.233.335.347}}{\text{Rp.18.731.761.537}} \times 100\% = 1,25\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 adalah sebesar 1,25%.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, rata-rata nilai capaian indikator kinerja adalah 99,45% dengan kategori **sangat baik**, dengan nilai tertinggi adalah 101,10% yaitu pada sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah.

2. Capaian Indikator Kinerja

Jika dilihat dari realisasi 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dengan target A (89,98).

Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian adalah A (89,50) atau sebesar 99,47% dengan predikat **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian ini memakai nilai evaluasi tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian tahun 2025 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja tahun 2025 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret tahun 2026.

b. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian dengan target 91.

Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian adalah 92 atau sebesar 101,10% dengan predikat **sangat baik**.

c. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) dengan target 3,16 triliun.

Capaian indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) adalah 3,09 triliun atau sebesar 97,78% dengan predikat **sangat baik**. realisasi Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tahun 2025 memakai Nilai

PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tahun 2024 dikarenakan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tahun 2025 dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan pada bulan April tahun 2026

Capaian rata-rata ke 3 (tiga) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 99,45% dengan predikat **sangat baik**.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Anggaran belanja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2025 yang mendukung pencapaian sasaran strategis dialokasikan sebesar Rp.18.835.355.995 dan terealisasi sebesar Rp.18.498.426.190 atau sebesar 98,21%.

4.2. SARAN

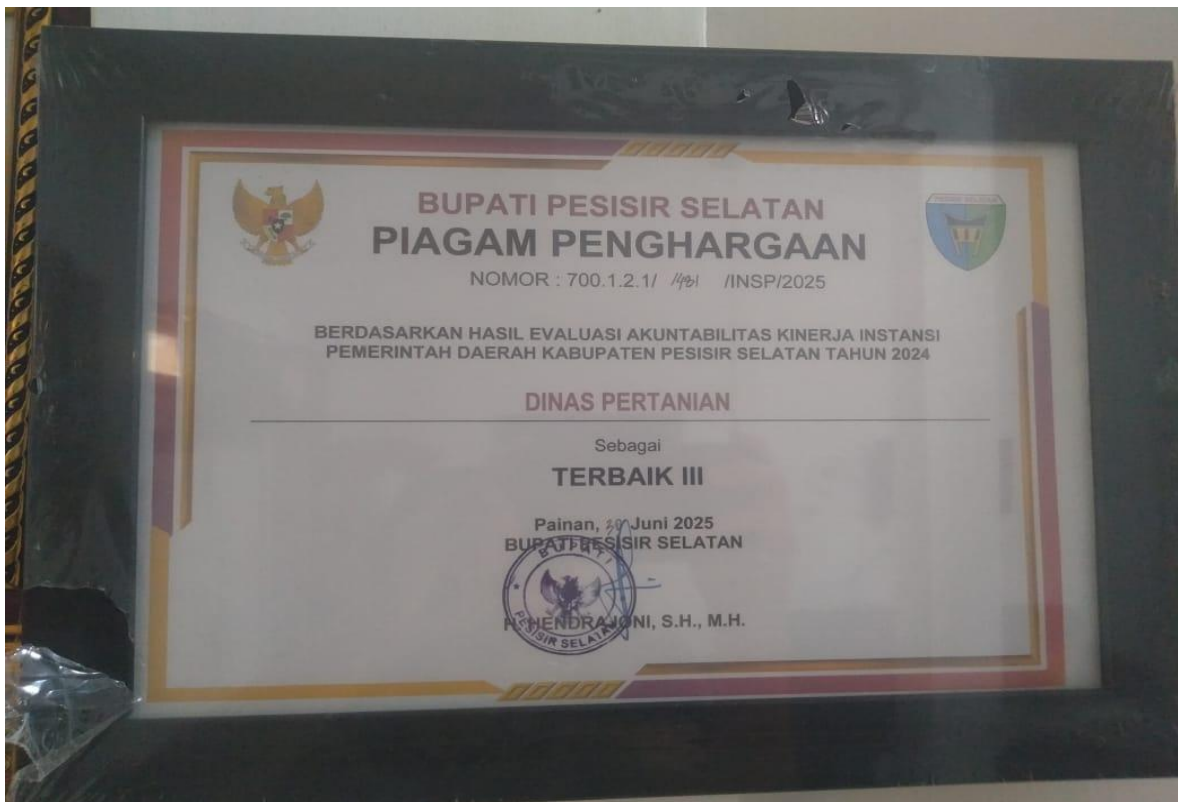
Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Meningkatkan kerjasama dengan Stakeholders terkait atau pemangku kepentingan, baik Pemerintah Provinsi dan Pusat, dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan serta Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Meningkatkan lagi pembinaan terhadap kelembagaan petani agar dapat meningkatkan sumber daya kelembagaan petani dan petani yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Pesisir Selatan.



DAFTAR LAMPIRAN

PENYERAHAN PENGHARGAAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2025 KEPADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN SEBAGAI TERBAIK III



**PENYERAHAN PENGHARGAAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 KEPADA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI TERBAIK I**

